



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎(0752). 84506 Padang Panjang 27118.
Email : itkopadangpanjang@gmail.com – website: www.padangpanjang.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perhubungan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang, Februari 2025

Inspektur,



Dr. Syahrir S.H., M.H., CGCAE
NIP. 197004051997031004

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang merupakan laporan kinerja pada tahun pertama pelaksanaan RPD dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sehingga diharapkan juga dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan kedua dokumen perencanaan tersebut.

LKjIP Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa "Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir". Penyusunan/penyampaian Laporan Kinerja dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan juga sebagai evaluasi terhadap program kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam tahun dimaksud. Selain itu, Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada public secara tidak langsung berpartisipasi mengadakan pengawasan secara optimal keberhasilan LKjIP ini juga menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dalam melaksanakan Sasaran Strategis Kota Padang Panjang.

Melalui laporan ini, Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang berharap dapat memberikan gambaran objektif bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja kedepan secara produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam urusan perhubungan .

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini semoga dapat menjadi sarana evaluasi untuk mengoptimalkan kinerja dinas lebih baik pada masa mendatang.

Padang Panjang, Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG



ARKEZ REFAGUS, S.Sos
Nip. 19651112 198602 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
LAMPIRAN	iv
IKHTISAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.4 Struktur Organisasi	3
1.5 Sumber Daya Manusia	5
1.6 Aspek Strategis dan Isu Strategis	6
1.7 Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Renstra Strategis 2024-2026	10
2.1.1 Tujuan dan Sasaran RPD	11
2.1.2 Tujuan dan Sasaran OPD	11
2.1.3 Strategis dan Kebijakan	12
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.1.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	16
3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	21
3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Akhir Renstra	22
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional dan Propinsi	23
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	24
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	28
3.2 Realisasi Anggaran	35
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Permasalahan dan Kendala	38
4.3 Saran/Rekomendasi	38



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2024	5
Tabel 1.2	Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024	5
Tabel 1.3	Data Pegawai dengan Kompetensi Teknis dan Pendidikan Transportasi Tahun 2024	5
Tabel 1.4	Data Tenaga Harian Lepas/Non ASN pada Dinas Perhubungan Tahun 2024	6
Tabel 2.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	11
Tabel 2.2	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD, Tujuan, Sasaran, Strategis, Arah Kebijakan dan Program Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	12
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	13
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024	14
Tabel 2.5	Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024	15
Tabel 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Konektivitas Tahun 2024	17
Tabel 3.2	Data Dukung Rasio Konektivitas Kota Padang Panjang Tahun 2024	18
Tabel 3.3	Rincian Data Kebutuhan Trayek	19
Tabel 3.4	Rincian Data Trayek Terlayani	19
Tabel 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Lalu Lintas Tahun 2024	19
Tabel 3.6	Data Dukung Rasio Kinerja Lalu Lintas Kota Padang Panjang Tahun 2024	21
Tabel 3.7	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Indikator Rasio Konektivitas Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	21
Tabel 3.8	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Indikator Kinerja Lalu Lintas Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	22
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Rasio Konektivitas Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Akhir Renstra	22
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Lalu Lintas Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Akhir Renstra	23
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Rasio Konektivitas dengan Standar Nasional/Propinsi	23
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Lalu Lintas dengan Standar Nasional/Propinsi	24
Tabel 3.13	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan	29
Tabel 3.14	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Hasil Kegiatan	30
Tabel 3.15	Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2024	35
Tabel 3.16	Perbandingan realisasi Keuangan Tahun 2023 dan Tahun 2024	36



GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

4

LAMPIRAN

Lampiran 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Lampiran 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



IKHTISAR

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang menetapkan 1 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja, yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp12.218.461.373,00 dengan penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang terdiri dari 2 Program dengan 12 Kegiatan serta 25 Sub Kegiatan yang menjadi ukuran capaian kinerja tahun pertama RPD.

Berdasarkan target program dan kegiatan serta alokasi anggaran sebagaimana tersebut di atas, capaian kinerja fisik Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebesar **100%** dengan realisasi anggaran mencapai **98,42%**.

Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Perhubungan didukung oleh 1 (satu) program, 6 kegiatan dan 11 sub kegiatan dengan indikator sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tahun 2024, sebagaimana tertera berikut ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan		Indeks Kualitas Infrastruktur Perhubungan	96,76	95,22	98,41	Sangat Baik
		Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	61,54	77,77	126,4	Baik
			Kinerja Lalu Lintas	0,45	0,39	86,67	Baik

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Total Anggaran	Realisasi	% Capaian	Tingkat Efisiensi
4.684.792.200,00	4.634.424.883,00	98,92	1,08

Dalam mencapai tujuan dinas perhubungan melaksanakan peningkatan infrastruktur baik sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas, perlengkapan jalan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas, pengawasan terhadap angkutan barang dan angkutan orang, penyediaan dan pengawasan lahan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan untuk mencapai sasaran dinas perhubungan melakukan



pemantauan dan pendataan rasio konektivitas kota dengan menghitung jumlah trayek yang terlayani serta kebutuhan trayek di kota Padang Panjang. Juga mengukur kinerja lalu lintas kota Padang panjang pada ruas-ruas jalan kewenangan kota Padang Panjang dengan menghitung volume kendaraan dan kapasitas jalan.

Dalam pencapaian tujuan terdapat beberapa kendala diantaranya ketersediaan lahan parkir yang masih belum memadai, dimana masih terdapat parkir liar atau parkir sembarangan. Perlengkapan jalan belum memadai, dimana masih ada traffic light belum bercctv. Kurangnya personil bantuan lalu lintas dalam pengendalian dan pengawasan lalu lintas pada titik rawan dan keramaian. Adapun dalam pencapaian sasaran terdapat beberapa kendala diantaranya rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan kota, menjamurnya angkutan online, menjamurnya ojek, jumlah kendaraan yang meningkat sedangkan panjang jalan tidak bertambah yang berakibat macet.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada pencapaian tujuan diatas adalah mengoptimalkan fasilitas parkir yang ada diwilayah Kota Padang Panjang dengan bekerja sama dengan pihak TNI untuk menyediakan lahan parkir di dekat pasar kuliner yang dapat menampung parkir bus roda 6. Mengupayakan bantuan teknis Kementrian Perhubungan untuk pemasangan traffic light bercctv, Optimalisasi personil dan pegawai pada Dinas Perhubungan turun kelapangan dalam rangka pengamanan arus lalu lintas pada persimpangan dan area sekolah dan pasar. Sedangkan upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala pada pencapaian sasaran adalah melakukan pengawasan dan pemantauan mobilitas angkutan kota, berkoordinasi dengan pihak perusahaan angkutan kota dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas layanannya. Terkait dengan layanan trayek angkutan kota yang belum semuanya terlayani perlu dilakukan kajian ulang sehingga dapat membantu masyarakat akan layanan transportasi.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan cita-cita berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu prasyarat Pemerintahan yang baik dan terpercaya dibutuhkan adanya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan antara system perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pelaporan dan evaluasi dari program dan kegiatan disetiap unit kerja yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Secara umum Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang menyajikan gambaran secara transparan atau capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tahun 2024. Laporan Kinerja ini terselesaikan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan anggaran yang digunakan tahun 2024. Sehingga dalam penyusunannya disampaikan dengan data dan terukur. Diharapkan penyelenggaraan sector perhubungan dapat memberi kontribusi dalam pembangunan Kota Padang Panjang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam laporan ini terkandung instrument yang mampu mengukur indicator kinerja dan anggaran dalam pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.



Tujuan Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang adalah agar tujuan dan sasaran serta pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dapat tercapai sesuai dengan target. Laporan ini sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan dimasa yang akan datang.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, maka dibentuklah Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah sebagai pembantu Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi pelaksana teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan, yang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan perhubungan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis urusan perhubungan;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



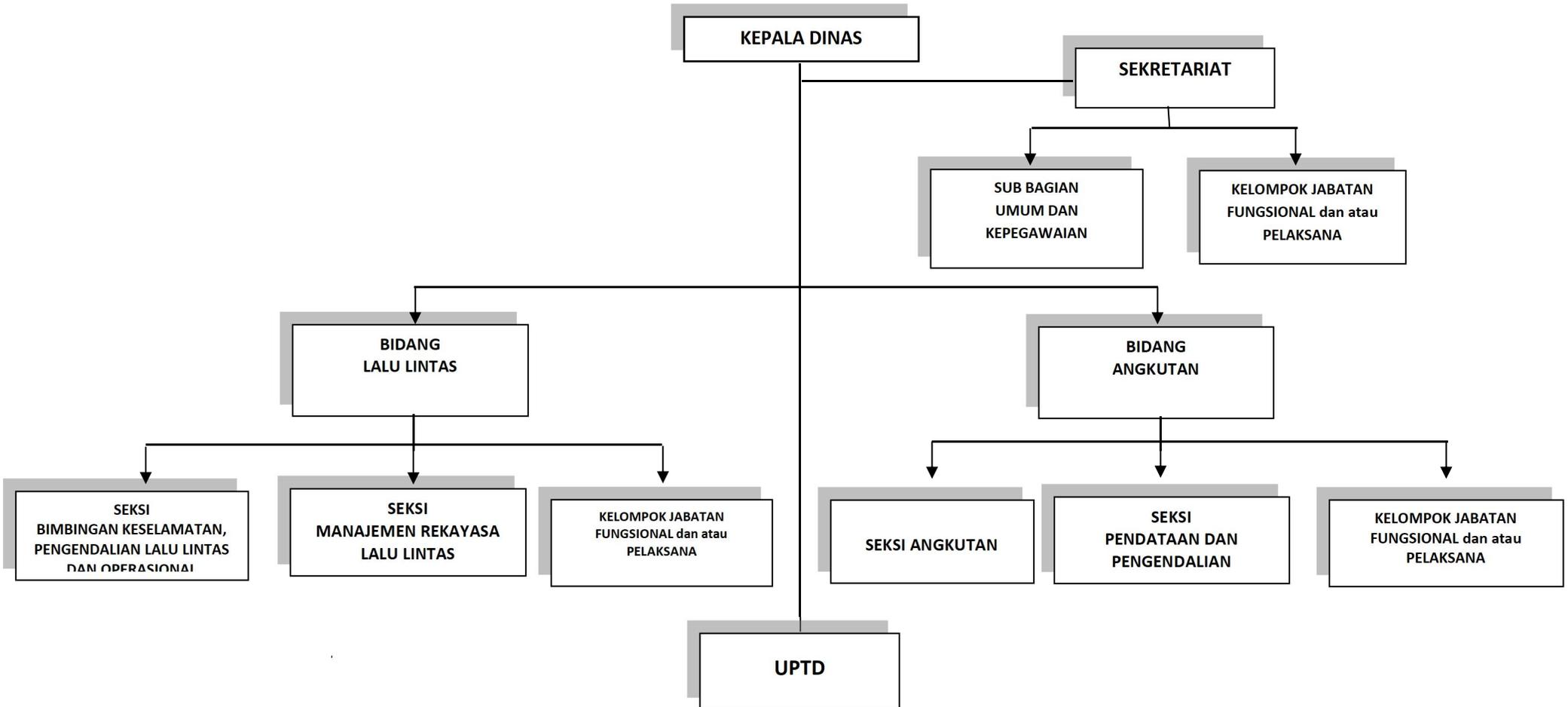
1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Sekretariat, membawahi;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2. Bidang Lalu Lintas, membawahi ;
 - a. Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional;
 - b. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
3. Bidang Angkutan, Perpakiran dan Akreditasi, membawahi ;
 - a. Seksi Angkutan;
 - b. Seksi Pendataan dan Pengendalian;
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. UPTD.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan akhir tahun 2024 Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang berjumlah 104 Terdiri dari 51 orang Pegawai Negeri Sipil dan 53 orang Tenaga Harian Lepas/Kontrak.

Adapun perincian PNS Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang menurut golongan ruang kepegawaian, jenjang pendidikan dan pendidikan penjenjangan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat

Unit Kerja	Jenis Kelamin		Golongan				Jumlah
	Pria	Wanita	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	
Kepala	1					1	1
Sekretariat	10	4	1	3	9	1	14
Bid. Lalu Lintas	18	4		13	8	1	22
Bid. Angkutan	8	1		3	5	1	9
UPTD PKB	4	1		2	3		6
Jumlah	41	10	1	21	25	4	51

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Tabel 1.2 Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Unit Kerja	SD-SLTP	SLTA	D2 – D3	S1	S2	Jumlah
Kepala				1		1
Sekretariat	1	3	3	6	1	14
Bid. Lalu Lintas	2	10	5	5	1	22
Bid. Angkutan	-	3	2	3	1	9
UPTD PKB	-	1	2	2	-	5
Jumlah	3	17	12	17	3	51

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Tabel 1.3 Data Pegawai Dengan Kompetensi Teknis dan Pendidikan Transportasi

Kualifikasi	Kondisi Riil	Pria	Wanita
Penguji	3	3	-
PPNS	2	2	-
D.IV Transportasi Darat	5	4	1
D.III MTJ	6	4	2
D.III Perkeretaapian	2	1	1
D.II PKB	1	1	
Jumlah	19	15	4

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024



Tabel 1.4 Data Tenaga Harian Lepas/Non ASN pada Dinas Perhubungan

Unit Kerja	Ketugasan	Jumlah
Sekretariat	Administrasi perkantoran	4
	Sopir	3
	Pengaja Malam	1
	Tenaga kebersihan	7
Bidang Lalu Lintas	Tenaga Bantuan Lalu Lintas	11
	Tenaga Teknik	5
Bidang Angkutan	Petugas TPR	6
	Pemungut Retribusi Parkir	14
UPTD PKB	Penjaga malam	1
	Petugas Kebersihan	1
Jumlah		53

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024

1.6 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS

Aspek strategis Dinas Perhubungan dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strengths)

- Struktur organisasi yang jelas dan lengkap
 - Dinas Perhubungan memiliki struktur yang terorganisir dengan baik, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Perpikiran dan Akreditasi, Kelompok Jabatan Fungsional dan atau Pelaksana, UPTD.
 - Tugas dan fungsi masing-masing bagian telah diuraikan dengan jelas dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 39 Tahun 2024.
- Realisasi anggaran tinggi dan sesuai dengan prinsip value for money
 - Realisasi anggaran mencapai 98,42%, menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana.
 - Dinas Perhubungan telah menerapkan prinsip ekonomis, efisien dan efektif dalam pengelolaan anggaran.
- Indek Kualitas Layanan Infrastruktur bernilai Sangat Baik dengan mutu A
 - Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang telah mencapai IKLI dengan nilai 95,22, memberikan pelayanan publik dalam urusan perhubungan yang memenuhi unsur layanan terkait perlengkapan jalan, fasilitas keselamatan, ketersediaan lahan parkir, sumber daya manusia.



2. Kelemahan (Weakness)

- Minimnya SDM berkompetensi dan Sertifikasi
Dari 51 ASN, hanya 2 pegawai berkompetensi PPNS, 3 pegawai berkompetensi Penguji, 2 pegawai berkompetensi Penilai Andalalin, 8 pegawai bersertifikasi bidang perhubungan, sehingga belum memenuhi pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Padang Panjang.
- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang
 - Sarana mobilitas layanan perhubungan masih kurang sehingga perlu ditingkatkan dengan penambahan kendaraan operasional roda empat dan roda dua.
- Pelatihan dan pengembangan SDM belum maksimal
 - Minimnya alokasi anggaran untuk pelatihan penguji ataupun sertifikasi dibidang perhubungan, menyebabkan keterbatasan peningkatan kompetensi.

3. Peluang (Opportunities)

- Optimalisasi pemanfaatan terminal Tipe C yang telah ada dengan meingkatkan sarana prasarana pendukung.
- Penataan jaringan trayek angkutan kota, sinkronisasi terkait penatausahaan angkutan umum antar pengusaha dengan pemerintah daerah.
- Optimalisasi pangkalan truk dan rest area angkutan barang sesuai dengan DED Rest Area.
- Penetapan rute angkutan barang dan bongkar muat dan lokasi bongkar muat pada kawasan bisnis.
- Melakukan analisa kebutuhan dan penambahan kantong parkir pada lokasi tertentu, taman parkir serta gedung parkir.
- Perlunya analisa kebutuhan terhadap sarana dan prasarana perlengkapan lalu lintas.
- Menjaga kualitas perlengkapan lalu lintas melalui kegiatan pengadaan dan rehabilitasi.
- Perlunya penengakan hukum bersama stakeholder terkait.
- Pengembangan wawasan dan kompetensi SDM baik pengujian, lalu lintas dan angkutan melalui pendidikan dan latihan yang berkompetensi.

4. Ancaman (Threats)

- Pelayanan angkutan umum seperti ketersediaan infrastruktur terminal Tipe C, peningkatan animo masyarakat menggunakan angkutan umum, pengembangan



jaringan trayek angkutan, peningkatan sarana dan kapasitas layanan angkutan umum.

- Pelayanan angkutan barang seperti analisa kebutuhan infrastruktur pangkalan dan rest area angkutan barang serta manajemen disrtibusi dan bongkar muat.
- Pelayanan parkir serta fasilitas perpakiran.
- Pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- Pelayanan serta perlengkapan lalu lintas dalam rangka keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Beberapa isu strategis sektor perhubungan berdasarkan factor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang ada. Isu ini adalah akumulasi permasalahan pelayanan yang sering dihadapi dan peluang-peluang yang ada, maka beberapa isu strategis pada Dinas Perhubungan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan layanan angkutan umum sebagai sarana angkutan massal.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas.
5. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor.
6. Belum memadainya terminal angkutan penumpang dan pangkalan truk (rest area).
7. Belum memadainya sarana dan prasarana lalu lintas
8. Belum memadai sarana dan prasarana perpakiran.

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang selama satu tahun di tahun 2024. Sistematika penyajian laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebaga berikut :



Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Lampiran

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.4 Struktur Organisasi
- 1.5 Sumber Daya Manusia
- 1.6 aAspek Strategis dan Isu Strategis
- 1.7 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Renstra Strategis 2024-2026
 - 2.1.1 Tujuan dan Sasaran RPD
 - 2.1.2 Tujuan dan Sasaran OPD
 - 2.1.3 Strategis dan Kebijakan
- 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
 - 3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
 - 3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Akhir Renstra
 - 3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Propinsi
 - 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
 - 3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Permasalahan dan Kendala
 - 4.2 Saran/Rekomendasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2024-2026

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin muncul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang memuat Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 3 tahun kedepan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang disusun berdasarkan amanah dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Perhubungan merupakan periode 3 tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang 2024-2026. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 tidak mengalami perubahan.

Selanjutnya dokumen Renstra menjadi acuan bagi Dinas perhubungan Kota Padang Panjang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya.



2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN RPD

Urusan Perhubungan dimuat pada Tujuan Rencana Pemerintah Daerah Padang Panjang yakni : **“Terwujudnya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas”**.

Urusan Perhubungan berada pada sasaran pertama mendukung tujuan RPD Kota Padang Panjang yang harus diemban atau dilaksanakan yakni : **“Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas”**.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN OPD

Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sebagai penyelenggaraan urusan perhubungan mempunyai tujuan dalam menggerakkan organisasinya yang berpijak pada RPD Kota Padang Panjang 2024-2026 yaitu **Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas** dan menjadi tujuan bagi Dinas Perhubungan yakni :

“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan”

Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi, perlu ditentukan sasaran apa yang akan dilakukan untuk pencapaian tersebut, oleh karenanya sasaran Dinas Perhubungan dalam pencapaian tujuan dimaksud, yakni

“Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran Strategis pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2024

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target		
					2024	2025	2026
Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang berkualitas	Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan		Indeks kualitas Infrastruktur Perhubungan	96,76	96,83	96,90
			Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio Konektivitas Kota	38,84	38,84	38,84
			Kinerja Lalu Lintas	0,339	0,339	0,339	

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026



2.1.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mendukung program unggulan Kota Padang Panjang, Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang juga berperan khusus disektor perhubungan, dimana diharapkan dapat tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur) secara optimal dan berkelanjutan serta terintegrasi untuk menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang, strategis dan arah kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Renstra

Tujuan RPD : Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang berkualitas				
Sasaran RPD : Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Optimalisasi Penyelenggaraan kendaraan angkutan kota sebagai alat transportasi masyarakat	Optimalisasi operasi angkutan kota dan trayek yang dijalani	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Optimalisasi sarana dan prasarana terminal tipe C	
			Peningkatan minat masyarakat menggunakan angkutan umum	
			Penataan/penertiban ojek online atau pangkalan	
		Optimalisasi Pendapatan Perpajakan	Optimalisasi pengawasan perpajakan (Perda Parkir)	
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpajakan	
			Penerapan digitalisasi perpajakan	
		Optimalisasi layanan dan fasilitas keselamatan lalu lintas transportasi darat	Optimalisasi pengendalian, pengawasan lalu lintas di jalan raya	
			Penambahan personil bantuan lalu lintas	
			Meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas	
			Meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan	
			Penyediaan sarana mobilisasi sarana prasarana dan operasional lalu lintas	
			Masih kurangnya ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas	
			Bimtek SDM PPNS untuk menangani pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan	
			Bimtek SDM Penilaian Andalalin dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Tenaga Teknis Elektro dan IT	
Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan rehabilitasi, survey dan alat angkut				
		Optimalisasi Pengelolaan PJU	Peningkatan sarana dan prasarana jaringan PJU	
			Kerjasama transformasi PJU (Mercury to LED dan Smart PJU)	

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026



2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam melaksanakan program pembangunan daerah dibidang perhubungan, terdapat indicator-indikator yang harus dicapai dalam pemenuhan kinerja, dan sebagai bahan dasar penyusunan kegiatan pada tahun 2024.

Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis perangkat daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	– Rasio Konektivitas Kota	Rasio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan kota ✓ Belum optimalnya layanan pada trayek yang telah ditetapkan 	Perbandingan layanan transportasi pada kawasan perkotaan terhadap jumlah total kawasan perkotaan yang telah ditetapkan	$IK1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan} + (IK2 \times \text{Bobot Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan})$ $IK1 (\text{Angkutan Jalan}) = (\text{Jumlah trayek yang dilayani dikali bobot trayek}) \text{ dibagi } (\text{Jumlah kebutuhan trayek})$ $IK2 (\text{Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan}) = \text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi} \times \text{bobot lintas} \text{ dibagi } (\text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan})$ Bobot Trayek atau lintas : <ul style="list-style-type: none"> a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot=1 b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot=0,8 c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (>3x dalam seminggu), bobot=0,5 	Perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
		– Kinerja Lalu Lintas Kota	Rasio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi ✓ Belum optimal perlengkapan lalu lintas ✓ Belum optimal sinkronisasi dengan stakeholder terkait 	Perbandingan volume lalu lintas kendaraan terhadap kapasitas jalan kendaraan	$DS = V/C$ $DS = \text{Derajat Kejenuhan}$ $V = \text{volume lalu lintas (kendaraan per jam)}$ $C = \text{kapasitas jalan (kendaraan per jam)}$ Jika nilai DS lebih besar dari 1, berarti jalan tersebut sudah mengalami kelebihan kapasitas (jenuh).	Perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Sumber : IKU Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026



2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan Perubahannya.

Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 dalam mencapai sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan target kinerja tahun pertama Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, yang memuat sasaran strategis indikator kinerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dengan Walikota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Awal	Perubahan
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	61,54	61,54
		Kinerja Lalu Lintas	0,45	0,45

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Awal	Perubahan	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.827.373.084,00	7.362.528.915,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.971.298.600,00	4.836.564.300,00	APBD

Sumber : PK Perubahan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024



Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2024 tersebut, Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang didukung anggaran sebesar Rp.11.798.671.684,00 dengan 2 (dua) program dan 12 Kegiatan dan 25 Sub kegiatan, pada bulan Maret 2023 ada pergeseran DPA-SKPD Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang disebabkan karena adanya refocussing anggaran. Pada bulan Oktober 2023 ada perubahan DPA-SKPD Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang pada Pendapatan Asli Daerah, Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan perubahan anggaran menjadi Rp.12.199.093.215,00. Pada bulan Desember kembali terjadi pergeseran dalam rangka penyesuaian anggaran tambahan penghasilan PNS yang harus dibayarkan pada tahun anggaran berjalan, dimana sebelumnya dianggarkan pada tahun berikutnya, dengan perubahan anggaran menjadi Rp. 12.218.461.373,00. Berikut tabel penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 :

**Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	61,54	Penyelenggaraan Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.684.792.200
			0,45	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	3.122.557.100
		Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota		2.845.377.100	
		Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		277.180.000	
		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		6.438.000	
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		6.438.000	
		Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir		450.422.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota		450.422.000	
		Kegiatan Pengujian Berkala kendaraan bermotor		128.000.000	
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan bermotor		25.000.000	
		Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor		103.000.000	
		Kegiatan Pelaksanaan dan rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Kab/Kota		690.538.400	
		Penataan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota		54.685.500	
		Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas		210.474.900	
		Pengawasan dan Pnendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan kab/kota		398.862.500	
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab/kota	26.515.500		
Kegiatan Penyediaan Angkutan umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	286.836.700				
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Kab/Kota	286.836.700				

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target indicator kinerja sasaran strategis dengan realisasi untuk mengetahui capaian kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi baik terhadap kinerja maupun terhadap penggunaan sumber daya untuk menetapkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan kinerja tahunan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara target rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Dinas perhubungan Kota Padang Panjang meliputi pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan.

Indikator capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 dihitung dengan melakukan survey dan pendataan untuk menghitung indikator kinerja rasio konektivitas kota dan rasio kinerja lalu lintas.

3.1.1 MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang mengukur tingkat capai target kinerja dengan 2 indikator kinerja yang telah ditetapkan, adapun pengukuran sasaran strategis dan indikator kinerja yang dicapai berdasarkan realisasi tahun 2024 yaitu :

Indikator 1, Rasio Konektivitas Kota

Untuk mengetahui tingkat konektivitas jaringan transportasi darat dan sungai, danau dan penyebrangan di wilayah kewenangan kabupaten/kota dapat dihitung rumus sebagai berikut :



$$\text{Rasio Konektivitas Kota} = (\text{Ik1} \times \text{bobot Angkutan Jalan}) + (\text{Ik2} \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$$

- IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd Kota Padang Panjang x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada Kota Padang Panjang)
- IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd Kota Padang Panjang x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)

Bobot Trayek atau Lintas :

- a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
- b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8
- c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (>3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

Kota Padang Panjang tidak ada angkutan sungai, danau dan penyeberangan sehingga dalam penghitungan rasio konektivitas kota cukup menghitung IK 1 yaitu angkutan jalan.

Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	61,54	77,77	126,4%

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Penghitungan nilai indikator kinerja diatas berdasarkan hasil survey dan data di lapangan dan penghitungan sesuai dengan rumus yang telah ditentukan, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Konektivitas Kota} &= \text{IK1} + \text{IK2} \\ \text{IK 1} &= \frac{(7 \times 100)}{9} \\ \text{IK 1} &= 77,77 \\ \text{IK 2} &= (0 \times 0) / 0 = 0 \\ \text{RKK} &= \text{IK 1} + \text{IK 2} = 77,77 + 0 \\ \text{RKK} &= 77,77 \end{aligned}$$



Dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan akses jalan dan transportasi darat khususnya angkutan kota, sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota Dalam Kota Padang Panjang. Serta untuk mendukung akses jalan yang tidak ditempuh oleh angkutan kota, maka Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang mengoperasikan 2 unit bus sekolah untuk menjemput anak sekolah di 2 (dua) kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Nomor 57.A Tahun 2022 tentang Trayek Bus Sekolah di Kota Padang Panjang.

Berikut layanan trayek angkutan kota yang melayani masyarakat di Kota Padang Panjang.

Tabel 3.2 Data Rasio Konektivitas Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Layanan	Total Trayek	Bobot Trayek	Keterangan
1	Jumlah Trayek Terlayani			
	a. Antar Kota Dalam Kab/Kota	7	1	5 trayek Angkot + 2 Bus Sekolah
	b. Antar Kota Dalam Kab/Kota	-		
	Jumlah	7		5 trayek Angkot + 2 Bus Sekolah
2	Jumlah Kebutuhan Trayek			
	Terminal Bukit Surungan - Silaing Bawah	9	-	8 trayek Angkot + 1 Bus Sekolah
	a. Antar Kota Dalam Kab/Kota	-	-	
	b. Antar Kota Dalam Kab/Kota	9		8 trayek Angkot + 1 Bus Sekolah
	Jumlah	9		8 trayek Angkot + 1 Bus Sekolah

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Dari tabel diatas terdapat 5 (tujuh) trayek yang terlayani dari 13 (tiga belas) trayek angkutan kota yang ditetapkan pada Perwako Nomor 16 Tahun 2006 dan 2 trayek terlayani dari 2 (dua) trayek bus sekolah yang ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Nomor 57.A Tahun 2022. Sedangkan kebutuhan trayek di Kota Padang Panjang masih dibutuhkan 9 (sembilan) trayek yang akan dilalui oleh angkutan kota dan bus sekolah.

Berikut rincian data dukung rasio konektivitas kota Padang Panjang :



Tabel 3.3 Rincian Data Kebutuhan Trayek

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi
1	02	Pusat Pasar - Jl.Imam Bonjol - Jl.Adam BB - Jl.Pemuda - Koto Panjang - Koto Katik - Sago - Simpang Monas	Angkutan Kota	
2	04	Pusat Pasar - Jl. Imam Bonjol - Jl. K.h. Ahmad Dahlan - simpang Hasiba - Jl. H. Agus Salim (Guguk Malintang) - Jl. Bahder Johan - Kampung Jambak ISI - Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Sudirman - M. Syafei - Pusat Pasar	Angkutan Kota	
3	05	Pusat Pasar - Jl.Imam Bonjol - Jl.Kh. Ahmad Dahlan - Jl.A. Yani - Ransam - Kubu Gadang - Batu Tagak - Jl.Air Asin	Angkutan Kota	
4	07	Pusat Pasar - Jl.M. Syafei - Jl.Imam Bonjol - Jl.Anas Karim - Gudang Garam - Tanah Hitam - Jl. Bgd Aziz Chan - Jl. Pelita Kubu Cubadak - Depan Kantor Lurah Koto Panjang - Perumnas Perbukitan Teduh (Padang Reno) - Jl. Ahmad Karim	Angkutan Kota	
5	08	Terminal Bukit Surungan - Jl. Hamka - Jl. Soekarno Hatta - Jl. Sudirman - Jl.Kh. Ahmad Dahlan - Jl.A. Yani - Batas Kota.	Angkutan Kota	
6	09	Terminal Bukit Surungan - Jl. Hamka - Jl. Soekarno Hatta - Jl. St. Syahrir - Silaing Bawah.	Angkutan Kota	
7	12	Pusat Pasar - Jl. M.Syafei - Jl. Imam Bonjol - Jl. Anas Karim - Perumahan Guru - Jl. Kartini - Jl. Bagindo Azis Chan - Jl. Pemuda - Jl.Adam BB - Jl.Imam Bonjol - Jl. Sudirman - Jl.M.Syafei - Pusat Pasar	Angkutan Kota	
8	13	Pusat Pasar - Jl.M.Syafei - Jl.Imam Bonjol - Jl.Anas Karim - Kebun Sikolos - Jl. Rasuna Said - Kampung Teleng - MAN 3	Angkutan Kota	
9		Simpang SMKN 2 Padang Panjang – SDN 6 Sigando – SMPN 3 Padang Panjang – Simpang Monas – SDN 15 Padang Panjang – SMKN 1 Padang Panjang – Simpang SMPN 1 Padang Panjang	Bus Sekolah	

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Tahun 2024

Dari tabel diatas terdapat 8 (delapan) trayek yang dibutuhkan aktif kembali dari 13 (tiga belas) trayek angkutan kota yang ditetapkan pada Perwako Nomor 16 Tahun 2006 dan 1 unit tambahan bus sekolah.

Tabel 3.4 Rincian Data Trayek yang Dilayani

No	Kod	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan	Bobot
1	01	Pusat Pasar- Jl.Imam Bonjol - Jl.Kh. Ahmad Dahlan - Jl.A. Yani - Batas Kota	Angkutan Kota	>5x seminggu	Tinggi	1
2	03	Pusat Pasar - Jl.Imam Bonjol - Jl.Kb. Ahmad Dahlan - Jl.A. Yani - Jl.Ibrahim Musa - MAN Gunung - Jl.Lingkar parnansiangan -Jl.Lingkar Kacang Kayu	Angkutan Kota	>5x seminggu	Tinggi	1
3	06	Pusat Pasar - Jl.Imam Bonjol - Jl. KH Ahmad Dahlan - Simp. Hasiba Belok kiri - Jl.H. Agus Salim - Simpang Tanjung - Bukit Kandung - Tabek Gadang - RSUD Gantiang	Angkutan Kota	>5x seminggu	Tinggi	1
4	10	Pusat Pasar - Jl.M. Syafei - Jl.Imam Bonjol - Jl.M. Yamin - Jl.St. Syahrir - Simpang RPH - SMAN 3 - Simpang RPH - Jl.St. Syahrir .Silaing Bawah	Angkutan Kota	>5x seminggu	Tinggi	1
5	11	Pusat Pasar - Jl.M. Syafei - Jl.Imam Bonjol - Jl.M. Yamin - Jl.Soekarno Hatta - Simpang MTSN - Jl.Karim Amarullah - Terminal Bukit Surungan	Angkutan Kota	>5x seminggu	Tinggi	1
6		Simpang Pertamina Silaing Bawah – Simpang Bappeda – SMAN 1 Padang Panjang – SMKN 1 Padang Panjang – SMPN 3 Padang Panjang – SMKN 2 Padang Panjang	Bus Sekolah	>5x seminggu	Tinggi	1
7		SMPN 6 Padang Panjang – SMKN 1 Padang Panjang – SMPN 1 Padang Panjang – Komplek SD Guguak Malintang	Bus Sekolah	>5x seminggu	Tinggi	1
Rata – rata bobot						1

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Tahun 2024



Dari tabel diatas terdapat 5 (lima) trayek yang terlayani dari 13 (tiga belas) trayek angkutan kota yang ditetapkan pada Perwako Nomor 16 Tahun 2006 dan 2 unit bus sekolah yang melayani trayek yang tidak dilalui angkutan kota.

Indikator 2, Kinerja Lalu Lintas

Kinerja lalu lintas dilakukan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien suatu sistem transportasi dalam mengatur pergerakan kendaraan dan pengguna jalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lalu lintas seperti kecepatan rata-rata, volume kendaraan, tingkat kemacetan, waktu perjalanan serta keselamatan di jalan. Adapun rumus penghitungan kinerja lalu lintas, sebagai berikut :

$$\text{Kinerja Lalu Lintas Kota} = \frac{V \text{ (Volume Kendaraan)}}{C \text{ (Kapasitas Kendaraan)}}$$

DS = V/C

DS = Derajat Kejenuhan

V = volume lalu lintas (kendaraan per jam)

C = kapasitas jalan (kendaraan per jam).

Jika nilai DS lebih besar dari 1, berarti jalan tersebut sudah mengalami kelebihan kapasitas (jenuh).

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Rasio Kinerja Lalu Lintas Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas	0,45	0,39	86,67%

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Penghitungan nilai indikator kinerja diatas berdasarkan hasil survey dan data di lapangan dan penghitungan sesuai dengan rumus yang telah ditentukan, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Degree of Saturation} &= \text{Volume} / \text{Capacity} \\ \text{DS} &= \frac{4,27}{11} \\ \text{DS} &= 0,39 \end{aligned}$$

Penghitungan indikator ini dengan melakukan pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan utama yang ada di wilayah Kota Padang Panjang, sebagaimana tabel dibawah ini :



**Tabel 3.6 Data Dukung Rasio Kinerja Lalu Lintas
Kota Padang Panjang Tahun 2024**

No	Ruas / Nama Jalan *)	Panjang (km)	Co	Fcw	FCsp	FCsf	Volume (smp/jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	Level Of Service
1	Jl. Sudirman	0.480	2900	1.00	1.00	0.82	852.25	2235.32	0,54	C
2	Jl. A. Yani	3.470	2900	1.00	1.00	0.92	968.50	2507.92	0,50	C
3	Jl. Soekarno Hatta	1.600	2900	1.00	1.00	0.89	614.58	2426.14	0,36	B
4	Jl. Bukit Kandung-Solok Batung	1.250	2900	1.14	0.91	0.94	513.50	2921.18	0,24	B
5	Jl. ST. Syahrir	2.961	2900	1.00	1.00	0.89	1141.67	2426.14	0,65	C
6	Jl. Hamka	1.000	2900	1.00	1.00	0.92	719.00	2507.92	0,39	B
7	Jl. Agus Salim	2.055	2900	1.00	1.00	0.94	497.33	2562.44	0,25	B
8	Jl. Bahder Johan	0.990	2900	0.87	1.00	0.73	608.17	1731.14	0,34	B
9	Jl. M Yamin	0.840	2900	1.00	1.00	0.89	720.00	2426.14	0,40	B
10	Jl. H. Kamarullah	0.650	3100	1.25	1.00	0.94	513.08	3423.95	0,24	B
11	Jl. Syekh Daud Rasidi	0.800	3100	1.14	1.00	0.92	753.58	3056.20	0,36	B
Jumlah							7901.66	28224.6374	4,27	B
Rata-Rata							718.3327	2565.88	0,39	B

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat kinerja lalu lintas di Kota Padang Panjang dalam kategori aman dan lancar dengan nilai ratio 0,39 dimana nilai total V/C ratio sebesar 4,27 berbanding 11 ruas jalan yang dihitung dengan tingkat Pelayanan B.

3.1.2 MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Dengan membandingkan kondisi tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dapat terlihat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis, pada tabel berikut :

Indikator 1, Rasio Konektivitas Kota

Tabel 3.7 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio Konektivitas Kota	38,46	38,46	100	38,46	84,62	100	61,54	77,77	126,4

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Capaian Kinerja pada indikator rasio konektivitas kota dari target 61,54 terealisasi sebesar 77,77 atau 126,4%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023



sebesar 84,62 maka mengalami penurunan sebesar 6,85. Hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah angkutan kota yang beroperasi, berkurangnya trayek terlayani.

Indikator 2, Kinerja Lalu Lintas

Tabel 3.8 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kinerja Lalu Lintas	0.339	0.339	100	0.45	0,45	100	0,45	0,39	86,67

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Capaian kinerja lalu lintas dari target 0,45 terealisasi sebesar 0,39 atau 86,67% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 0,45 maka capaian indikator ini mengalami kinerja yang baik, karena rasio kinerja lalu lintas memiliki trend menurun, semakin kecil angka rasio semakin bagus kinerja lalu lintas, hal ini didukung oleh volume kendaraan yang tidak terlalu padat diruas jalan utama disamping tahun 2024 masa pemulihan jalan penghubung antara padang panjang dan padang pasca longsor.

3.1.3 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Indikator 1, Rasio Konektivitas Kota

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra 2026
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Ratio Konektivitas Kota	77,77	38,84

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat target akhir Renstra lebih rendah dari capaian tahun 2024, hal ini dikarenakan penetapan target Renstra tahun 2024 masih rendah, sedangkan capaian pada tahun 2024 berada pada angka cukup baik, karena capaian tahun sebelumnya lebih tinggi dari target yang ditetapkan, hal ini berdampak terus pada target tahun-tahun berikutnya hingga target akhir Renstra tahun 2026.



Indikator 2, Kinerja Lalu Lintas

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra 2026
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kinerja Lalu Lintas	0,39	0,339

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Realisasi kinerja lalu lintas tahun 2024 dengan ratio 0,39 lebih tinggi jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 dengan ratio 0,339. Hal ini disebabkan oleh perubahan iklim lalu lintas yang dipengaruhi oleh penambahan volume kendaraan, kondisi atau kapasitas jalan di tiap tahunnya.

3.1.4 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL ATAU PROPINSI

Indikator 1, Rasio Konektivitas Kota

Sebagai patokan atau tolak ukur perbandingan indikator kinerja dapat dilihat rasio konektivitas standar nasional dan propinsi, sebagai berikut :

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Propinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar	
				Nasional	Propinsi
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio Konektivitas Kota	77,77	57	68,2

Sumber : Kemenhub RI dan Dinas Perhubungan Prop. Sumatera Barat Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat rasio konektivitas nasional dengan nilai rasio 57 mencakup transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian, mencerminkan nilai yang cukup baik dalam pemenuhan keterhubungan berbagai daerah dan menyediakan akses kepada warga negara diseluruh wilayahnya yang didukung oleh infrastuktur transportasi, jaringan komunikasi dan akses layanan dasar. Sedangkan rasio konektivitas propinsi dengan rasio 68,2 berada pada nilai yang cukup baik dalam tingkat aksesibilitas antar wilayah yang ada di Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan realisasi konektivitas kota Padang Panjang dengan rasio 77,77 maka penyediaan akses transportasi bagi masyarakat cukup baik dan masih perlu peningkatan layanan sarana dan prasarana terkait angkutan dan akses trayek yang dilayani.



Indikator 2, Kinerja Lalu Lintas

Sebagai patokan atau tolak ukur perbandingan indikator kinerja dapat dilihat rasio kinerja lalu lintas standar nasional dan propinsi, sebagai berikut :

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Propinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar	
				Nasional	Propinsi
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kinerja Lalu Lintas	0,39	0,7	0,41

Sumber : Kemenhub RI dan Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan kinerja lalu lintas skala nasional dengan rasio 0,7 menunjukkan kondisi lalu lintas mulai padat, tetapi masih dapat bergerak dan lancar, kemacetan terjadi pada jam sibuk. Sedangkan kinerja lalu lintas propinsi Sumatera Barat dengan rasio 0,41 berada pada kondisi lalu lintas masih sangat lancar, jalan memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung volume lalu lintas yang tanpa kemacetan. Jika dibandingkan dengan kinerja lalu lintas Kota Padang Panjang dengan rasio 0,39 maka jalan di kota kecil ini masih memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung volume kendaraan dan tanpa kemacetan.

3.1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA DAN ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Berdasarkan dari tabel 2.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 masih perlu dilakukan evaluasi dan analisa pada masing-masing indicator tersebut :

Indikator 1, Ratio Konektivitas Kota

Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas kota adalah terhubungnya antar wilayah didalam kota, termasuk angkutan perkotaan baik transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara, khusus konektivitas kota Padang Panjang hanya mengakomodir transportasi darat yaitu angkutan kota.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian indicator ratio konektivitas kota antara lain :



1. Trayek angkutan tidak aktif pada sejumlah trayek yang ditentukan sehingga sudah kurang menyentuh kebutuhan masyarakat;
2. Ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan termasuk pengemudi dan fisik kendaraan yang sangat tinggi.
3. Banyak bermunculan alternative angkutan jenis lain yang menawarkan pelayanan yang lebih baik sehingga angkutan umum yang ada mulai ditinggal penumpangnya.
4. Kondisi fisik kendaraan, seperti umur kendaraan, sudah tidak layak jalan, ini juga karena tidak ada kemampuan pengusaha untuk melakukan pemeliharaan.

Solusi :

1. Telah dilakukan pengawasan terminal terhadap operasi angkutan umum.
2. Menghimbau pemilik/pengusaha angkutan untuk mengurus KP dan melakukan KIR secara rutin.
3. Diupayakan mengaktifkan kembali trayek angkutan umum yang telah lama tidak aktif dengan mengkoordinasikan bersama pihak-pihak terkait.

Indikator 2, Kinerja Lalu Lintas

Kinerja lalu lintas merupakan kemampuan dari suatu jalan dalam melayani arus lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan tersebut. Kinerja jalan ditentukan oleh kapasitas, derajat kejenuhan ("Degree of Saturation", DS), kecepatan rata-rata, waktu perjalanan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian indicator ratio kinerja lalu lintas antara lain :

1. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi yang cukup tinggi.
2. Peningkatan Volume Lalu Lintas pada beberapa ruas jalan.
3. Perubahan tata guna lahan dan pusat bisnis.
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana serta fasilitas lalu lintas.

Solusi :

1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas serta ketersediaan fasilitas pendukung lainnya yang membuat kinerja lalu lintas semakin baik
2. Menekan kepemilikan kendaraan pribadi dengan berupaya melakukan pengembangan jaringan trayek angkutan umum dengan pelayanan yang baik dengan media angkutan umum massal
3. Adanya upaya peningkatan penegakan aturan secara maksimal.
4. Melakukan penataan dan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi beban kapasitas jalan menuju pusat bisnis.



3.1.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

1. Efisiensi Sumber Daya Manusia

1.1 Komposisi dan Kualifikasi SDM

- Dinas Perhubungan memiliki 51 ASN, 53 pegawai harian, 1 pegawai honorer.
- Sebaran Golongan ; Mayoritas pegawai berada di Golongan III (49,02%), yang mencerminkan belum memadai jumlah pelaksana dan tenaga teknis.
- Tingkat Pendidikan :
 - 23,53% pegawai memiliki gelar D2-D, 33,33% pegawai memiliki gelar Sarjana (S1), 5,9% memiliki S2.
 - 33,33% pegawai lulusan SLTA, 5,9% lulusan SMP.
- Sertifikasi Kompetensi :
 - 3 pegawai memiliki Kompetensi Penguji
 - 2 pegawai memiliki Kompetensi PPNS
 - 3 pegawai memiliki Kompetensi Penilaian Andalalin
 - 2 pegawai memiliki Sertifikasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
 - 4 pegawai memiliki Sertifikasi Orientasi Lalu Lintas
 - 4 pegawai memiliki Sertifikasi Diklat Traffict Light

1.2 Efisiensi dan Permasalahan SDM

Keunggulan :

- Struktur organisasi cukup lengkap dengan pembagian tugas yang jelas dalam bidang teknis.
- Kualifikasi pendidikan cukup baik, dengan mayoritas pegawai berpendidikan tinggi.

Kelemahan :

- Keterbatasan jumlah personil operasional lapangan dalam mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, dengan hanya 9 ASN dan 11 pegawai harian total 22 orang.
- Keterbatasan tenaga teknis penerangan lampu jalan, dengan hanya 5 pegawai harian.
- Keterbatasan tenaga penguji kendaraan bermotor, dengan hanya 3 orang ASN, 1 pegawai penguji Tk. 3 dan 2 orang penguji Tk. 2, sementara Penguji Tk.5 sangat dibutuhkan mengingat UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang banyak menguji kendaraan roda 6.
- Keterbatasan tenaga yang berkompetensi dapat menurunkan kualitas pelayanan urusan perhubungan di Kota Padang Panjang.



- Minimnya program pelatihan dan peningkatan kompetensi berdampak pada kapabilitas ASN Dinas Perhubungan dalam penyelesaian masalah dan meningkatkan inovasi terkait sistem transportasi dan kebijakan perhubungan.

1.3 Rekomendasi untuk meningkatkan Efisiensi SDM

Strategi Perbaikan :

- Meningkatkan jumlah pegawai berkompentensi, terutama dalam bidang PPNS, Penguji dan Penilai Andalalin, Manajemen Angkutan
- Mendorong pelatihan berkelanjutan melalui program Bimtek dan Diklat yang dilaksanakan Lembaga Kementerian atau pun Pemerintah Daerah.

2. Efisiensi Sumber Daya Keuangan

2.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran

- Total Anggaran Belanja sebesar Rp. 12.218.461.373,00 dan 98,42% telah terealisasi, terdiri dari :
 - Rp. 7.390.667.528,00 (98,10%) untuk Program Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah
 - Rp. 4.634.424.883,00 (98,92%) untuk Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.2 Efisiensi dan Permasalahan Anggaran

Keunggulan :

- Realisasi anggaran mencapai 98,42%, menunjukkan efektivitas dalam perencanaan dan penggunaan dana.
- Kegiatan prioritas berjalan sesuai dengan rencana.

Kelemahan :

- Porsi anggaran untuk layanan publik dan peningkatan sarana dan prasarana perlengkapan lalu lintas dan keselamatan lalu lintas masih rendah.
- Minimnya anggaran untuk pelatihan dan pengembangan SDM bidang perhubungan.

2.3 Rekomendasi untuk Meningkatkan Efisiensi Anggaran

Strategi Perbaikan :

- Mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk peningkatan infrastruktur perhubungan
- Mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kompetensi ASN
- Optimalisasi efisiensi belanja operasional



3. Efisiensi Sarana dan Prasarana

3.1 Kondisi Sarana dan Prasarana

- Beberapa fasilitas pendukung belum optimal, terutama perangkat elektronik seperti laptop, printer, dan peralatan kerja lainnya.
- Masih kurangnya perlengkapan kantor seperti kursi dan meja
- Belum ada anggaran yang dialokasi untuk pengadaan kendaraan dinas
- Anggaran pemeliharaan gedung kantor yang masih minim yang menunjukkan keterbatasan dalam perencanaan kebutuhan fasilitas kerja

3.2 Efisiensi dan Permasalahan Sarana Prasarana

Keunggulan :

- Pemeliharaan aset daerah berjalan dengan baik, dengan realisasi anggaran 96,99%.
- Kebutuhan dasar operasional masih terpenuhi, meskipun ada beberapa keterbatasan.

Kelemahan :

- Kurangnya sarana mobilisasi lapangan baik roda 4 dan roda 2 yang representatif.
- Minimnya peralatan kerja menyebabkan penurunan efisiensi operasional.
- Kurangnya fasilitas pendukung, seperti sistem aplikasi pengujian kendaraan bermotor.

3.3. Rekomendasi untuk Meningkatkan Efisiensi Sarana dan Prasarana

Strategi Perbaikan:

- Mengusulkan pengadaan peralatan kantor
- Mengalokasikan dana pemeliharaan gedung dan peralatan mesin.

3.1.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU MENJADI PENYEBAB KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA.

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran adalah menentukan target kinerja dan anggaran yang dituangkan dan Dokumen Anggaran dan Perjanjian Kinerja. Melakukan evaluasi kerja agar dapat meninjau sejauh mana kegiatan berjalan dan serapan dana yang telah digunakan serta mengetahui kendala atau permasalahan dalam pencapaian kinerja.

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dengan 1 (satu) sasaran



strategis dan didukung oleh 1 (satu) program dengan 6 kegiatan dan 11 Sub Kegiatan.

Tabel 3.13 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
KEGIATAN PENGELOLAAN TERMINAL TIPE C	
3.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
KEGIATAN PENERTIBAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/kota
KEGIATAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	
5.	Penyediaan Bukti Lulus uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
KEGIATAN PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALULINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	
7.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota
8.	Pengadaan,Pemasangan,Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas
9.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota
10.	Forum lalulintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota
KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1(SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	
11.	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) Kabupaten/Kota

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Untuk mendukung indikator perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, maka program prioritas Dinas Perhubungan yakni Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :



**Tabel 3.14 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
dan Hasil Kegiatan**

PROGRAM	HASIL KEGIATAN
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Pengadaan dan pemasangan tiang lampu penerangan jalan umum (PJU)/Lampu Hias yang dilaksanakan sebanyak 20 titik yang terpasang di Jalan Khatib Sulaiman, Kelurahan Pasar Baru sebanyak 20 titik.
	2. Pengadaan dan pemasangan speedbump pada daerah rawan kecelakaan sebanyak 3 titik di lokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Kel. Koto Panjang perumahan Saiyo RT 18; - Kel. Ekor Lubuk depan rumah Green Xandria - Sungai Andok depan Masjid Nurul Khairat
	1. Pemasangan cermin tikung yang telah mengalami kerusakan, lokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Tami; - Ngalau; - Simpang 3 Komplek Kel. Guguk Malintang; - Simpang 3 Masjid Kel. Guguk Malintang; - Simpang Solok Batuang; - Kelok Tahu 1 Tepi Bengkel; - Kelok Tahu 2 Tepi Sawah; - Pertigaan Jembatan Putih Pendakian; - Sungai Andok; - Pertigaan Kel Tanah Pak Lambik arah ke Kantor Dep. Agama; - Pertigaan jalan besar setelah jembatan putih; - Kelok Selayang.
	2. Pengadaan dan pemasangan Marka Lalu Lintas pada lokasi <ul style="list-style-type: none"> - Ruas Jalan Jend. Sudirman; - Ruas Jalan KH. Ahmad Dahlan; - Ruas Jalan Soekarno Hatta; - Ruas jalan M. Yamin.
	5. Penyelenggaraan Angkutan Mudik bagi Mahasiswa/I di Jabodetabek menggunakan 2 unit angkutan sewa
	6. Forum Lalu Lintas 2 kali pertemuan
	7. Pekerjaan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor 9 unit
	8. Peningkatan kompetensi Penguji PKB
	9. Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor
	10. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024



Pemasangan Marka Jalan



Pemasangan Speedbump





Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas



Penjemputan Mahasiswa Mudik



Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Uji



3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp12.218.461.373,00 yang dijabarkan dalam 2 program dan 11 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan terealisasi sebesar Rp12.025.092.411 atau 98,42%

Sedangkan dari 2 program dengan 11 Kegiatan yang berhubungan langsung dengan sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok hanya 1 Program dan 6 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.684.792.200,00 atau 38,34% dari total anggaran, dan terealisasi sebesar Rp4.634.424.883 atau 98,92% dari target anggaran strategis.

Aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai sasaran strategis pada kegiatan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dengan dukungan pembiayaan yang memadai akan mewujudkan pelayanan perhubungan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk peningkatan pelayanan, mobilitas, aksesibilitas serta informasi pada masyarakat Kota Padang Panjang.

Realisasi keuangan dan fisik untuk program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis Dinas perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.15 Realisasi Fisik dan Keuangan
Dinas Perhubungan Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sesuai PK Perubahan	Anggaran Sesuai LRA	Realisasi Anggaran Sesuai LRA
I	Penyelenggaraan Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.836.564.300,00	4.684.792.200,00	4.634.424.883,00
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.215.742.600,00	3.122.557.100,00	3.086.940.566,00
	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	2.938.562.600,00	2.845.377.100,00	2.821.593.415,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	277.180.000,00	277.180.000,00	265.347.151,00
2	Pengelolaan Terminal Tipe C	19.460.000,00	6.438.000,00	3.970.350,00
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	19.460.000,00	6.438.000,00	3.970.350,00
3	Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	450.422.000,00	450.422.000,00	449.115.768,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/kota	450.422.000,00	450.422.000,00	449.115.768,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran Sesuai PK Perubahan	Anggaran Sesuai LRA	Realisasi Anggaran Sesuai LRA
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	151.997.000,00	128.000.000,00	127.914.000,00
	Penyediaan Bukti Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	29.997.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	122.000.000,00	103.000.000,00	102.914.000,00
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	704.586.000,00	690.538.400,00	685.327.327,00
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota	54.685.500,00	54.685.500,00	53.446.500,00
	Pengadaan,Pemasangan,Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas	219.677.700,00	210.474.900,00	207.805.245,00
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota	398.862.500,00	398.862.500,00	397.628.082,00
	Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota	31.360.300,00	26.515.500,00	26.447.500,00
6	Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	286.836.700,00	286.836.700,00	281.156.872,00
	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (Satu) kabupaten/kota	294.356.700,00	286.836.700,00	281.156.872,00

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 sebesar Rp. 12.199.093.215,00 tidak sama dengan anggaran pada LRA Tahun 2024 sebesar Rp. 12.218.461.373,00, dengan selisih bertambah sebesar Rp. 19.368.158,00. Hal ini dikarenakan ada perubahan dan pergeseran pada bulan Desember terkait penyesuaian anggaran tambahan penghasilan yang harus dianggarkan dan dibayarkan pada tahun berjalan, dimana anggaran semula pembayaran TPP bulan desember direncanakan pada bulan Januari 2025.

Anggaran tahun 2024 terealisasi sebesar Rp12.025.092.411,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 11.041.109.385,28 terjadi peningkatan sebesar Rp. 983.983.025,82 atau 8,91%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.16 Perbandingan realisasi Keuangan Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	%
2023	11.386.527.573,00	11.041.109.385,28	96,97
2024	12.218.461.373,00	12.025.092.411,00	98,42

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dalam mencapai akuntabilitas kinerja yang maksimal, Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsi sebaik mungkin dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Kota Padang Panjang secara optimal melalui pelayanan transportasi. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya terdapat 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, walaupun belum semua dapat terealisasi dengan maksimal.

1. Keseluruhan anggaran yang tersedia dan mendukung kegiatan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sebesar Rp12.218.461.373,00 terealisasi sebesar Rp12.025.092.411,00 atau 98,42% dengan sisa anggaran sebesar Rp193.368.962,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 1,58%.
2. Sasaran strategis kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang didukung oleh 1 Program, 6 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan yang menjadi ukuran capaian kinerja tahun pertama Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
3. Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dengan indikator kinerja rasio konektivitas kota dengan target sebesar 61,54 terealisasi sebesar 77,77 atau 126,4%. Indikator rasio kinerja lalu lintas dengan target sebesar 0,45 dan terealisasi sebesar 0,39 atau 86,4%. Dari pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut beberapa hal perlu ditingkatkan dan dipertahankan demi menciptakan kondisi wajah transportasi kota Padang Panjang yang lebih baik.
4. Pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan anggaran sebesar Rp4.684.792.200,00 terealisasi sebesar Rp4.634.424.883,00 atau 98,92% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,08%.



4.2 PERMASALAHAN DAN KENDALA

Dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan ditemui beberapa permasalahan dan kendala pada indikator-indikator yang menjadi target kinerja, diantaranya :

1. Rendah minat masyarakat menggunakan angkutan kota;
2. Kurangnya daya tarik angkutan kota sebagai angkutan yang representatif;
3. Meningkatnya pertumbuhan angkutan online;
4. Akses trayek angkutan kota yang tidak aktif atau tidak terlayani;
5. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang cukup tinggi;
6. Perubahan tata guna lahan dan pusat bisnis;
7. Peningkatan volume lalu lintas di beberapa ruas jalan.

4.3 SARAN/ REKOMENDASI

Pencapaian kinerja sasaran strategis yang telah dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 diperoleh atas kerjasama dan dukungan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Diharapkan kedepannya dapat lebih ditingkatkan baik pelayanan lalu lintas dan angkutan, penyediaan sarana dan prasarana demi mewujudkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di Kota Padang Panjang.

Upaya perbaikan dan peningkatan akan terus dilakukan kedepan antara lain :

1. Area parkir khusus di daerah pasar pusat dan pasar kuliner, rest area pangkalan truk serta wacana pembangunan gedung parkir.
2. Mengupayakan bantuan pusat untuk pemasangan traffic light berCCTV, rehabilitasi rest area pangkalan truk.
3. Optimalisasi sarana prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Optimalisasi pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Meningkatkan layanan angkutan kota dan optimalisasi jalur trayek angkutan kota.

Padang Panjang, Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG



ARKESTEFAGUS, S.Sos
Nip. 1965112 198602 1 002





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PERHUBUNGAN

Jalan. Prof. DR. HAMKA NO. 87 Tel (0752) 82051 PADANG PANJANG 27115
Email: dishub.padangpanjang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARKES REFAGUS, S.Sos
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : SONNY BUDAYA PUTRA
Jabatan : PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 01 November 2024

PIHAK KEDUA
PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG



SONNY BUDAYA PUTRA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG



ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 19651112-198602 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	61.54	61.54
		Kinerja Lalu Lintas Kota	0.45	0.45

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.827.373.084	7.362.528.915	
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.971.298.600	4.836.564.300	





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PERHUBUNGAN

Jalan. Prof. DR. HAMKA NO. 87 Tel (0752) 82051 PADANG PANJANG 27115
Email: dishub.padangpanjang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARKES REFAGUS, S.Sos

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA

Jabatan : PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 01 November 2024

PIHAK KEDUA
PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG



SONNY BUDAYA PUTRA



PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG



ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 19651112-198602 1 002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	61.54	61.54
		Kinerja Lalu Lintas Kota	0.45	0.45

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.827.373.084	7.362.528.915	
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.971.298.600	4.836.564.300	



Padang Panjang, 01 November 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan. Prof. Dr. Hamka No. 87 Telp. (0752) 82051 Padang Panjang 27115
Email : dishub.padangpanjang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 700/ 07 /DISHUB-PP/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Lembar Kedua : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang
Nomor : 700/ 07 /DISHUB-PP/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 201 Tahun 2008 tentang Penyusunan Indikator Kinerja;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

Lembar Ketiga : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang
Nomor : 700/ 07 /DISHUB-PP/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG



ARKES REFAGUS

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Ketua DPRD Kota Padang Panjang;
2. Inspektur Kota Padang Panjang;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
4. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
 Kota Padang Panjang
 Nomor : 700/07/DISHUB-PP/2024
 Tanggal : 02 Januari 2024

**INDIKATOR UTAMA KINERJA (IKU)
 DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026**

PENJELASAN								
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASIRUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA
(1) 1	(2) Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	(3) - Rasio Konektivitas Kota	(3) Rasio	(4) ✓ Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan kota ✓ Belum optimalnya layanan pada trayek yang telah ditetapkan	(5) Perbandingan layanan transportasi pada kawasan perkotaan terhadap jumlah total kawasan yang telah ditetapkan	(6) IK1 x Bobot Angkutan Jalan) + (IK2 x Bobot Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani dikali bobot trayek) dibagi (Jumlah kebutuhan trayek) IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi x bobot lintas dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan) Bobot Trayek atau lintas : a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot=1 b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot=0,8 c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (>3x dalam seminggu), bobot=0,5	(7) Perhubungan	(8) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

PENJELASAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Kinerja Lalu Lintas Kota	Rasio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi ✓ Belum optimal per lengkapan lalu lintas ✓ Belum optimal sinkronisasi dengan stakeholder terkait 	Perbandingan volume lalu lintas kendaraan terhadap kapasitas jalan kendaraan	$DS = V/C$ DS = Derajat Kejenruhan V = volume lalu lintas (kendaraan per jam) C = kapasitas jalan (kendaraan per jam). Jika nilai DS lebih besar dari 1, berarti jalan tersebut sudah mengalami kelebihan kapasitas (jenruh).	Perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

